

ABSTRAK

Perkembangan teknologi lalu lintas saat ini memunculkan inovasi baru dalam pengenaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Adanya E-Tilang diharapkan menjadi sarana yang efektif dan efisien agar terciptanya ketertiban pengemudi dalam berlalu lintas. Namun, hadirnya E-Tilang membawa dampak bagi pemilik kendaraan rental roda empat yang menyewakan kendaraannya secara lepas kunci. Pemilik kendaraan rental roda empat dirugikan atas pengenaan denda pelanggaran yang dilakukan penyewa. Surat pemberitahuan E-Tilang yang dikeluarkan kepolisian melalui riwayat pelanggaran dikirimkan berdasarkan alamat pemilik kendaraan dan tidak dikeluarkan secara langsung. Sehingga surat E-Tilang datang ke alamat pemilik kendaraan rental saat penyewa tidak lagi menggunakan mobil sewanya, dalam artian masa sewanya sudah habis. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama, sanksi denda E-Tilang dapatkah dibebankan kepada pemilik kendaraan rental roda empat mengingat yang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah penyewa. Kedua, perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan rental roda empat yang dikenai sanksi denda akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh penyewa.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi denda E-Tilang karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penyewa tidak dapat dibebankan pada pemilik rental karena pelanggaran melekat pada orang yang melakukan pelanggaran, sebagaimana berdasarkan Pasal 1564 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan rental roda empat yang dikenai sanksi denda akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh penyewa, dapat ditinjau dari perlindungan hukum internal maupun perlindungan hukum eksternal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sewa Mobil, Sistem E-Tilang.

ABSTRACT

The current development of traffic technology has led to new innovations in the imposition of fines for violators of traffic rules. The existence of E-tickets is expected to be an effective and efficient means to create order in traffic for motorists. However, the presence of E-Tilang has had an impact on four-wheeled rental vehicle owners who rent out their vehicles on an off-key basis. Owners of four-wheeled rental vehicles are disadvantaged by the imposition of fines for violations committed by tenants. E-ticket notification letters issued by the police through a history of violations are sent based on the address of the vehicle owner and are not issued directly. So that the E-Tilang letter arrives at the address of the rental vehicle owner when the lessee is no longer using the rental car, in the sense that the rental period has expired. This raises a problem that will be discussed in this study. First, the E-Tilang fine can be imposed on the owner of a four-wheeled rental vehicle, considering that the one who commits a traffic violation is the tenant. Second, legal protection for owners of four-wheeled rental vehicles who are subject to fines due to traffic violations committed by tenants.

This research is a normative research using statutory and. The results of this study indicate that the imposition of E-Tilang fines for traffic violations committed by tenants cannot be borne by the rental owner because the violation is attached to the person who committed the violation, as based on Article 1564 of the Civil Code. Legal protection for owners of four-wheeled rental vehicles who are subject to fines as a result of traffic violations committed by tenants, can be reviewed from internal legal protection and external legal protection.

Keywords: Legal Protection, Rent Car, E-Tilang System.